

Peran Transparansi dan Akurasi terhadap Pengungkapan Skandal Korupsi PT ANTAM Tbk

Lutvie Novita Zalwa^{1*}, Milasiti Nursadiyah², Zahwa Nur Hasya³, Ida Farida Adi Prawira⁴

¹⁻³Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: lutvienovita@upi.edu¹, milasiti@upi.edu², zahwanur.996@upi.edu³,
ida.farida@upi.edu⁴

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Jawa Barat, Indonesia.

Korespondensi penulis: lutvienovita@upi.edu

Abstract. *The corruption case at PT ANTAM Tbk reflects weaknesses in transparency and accuracy within corporate management and the supervisory system in Indonesia. This study aims to analyze the role of transparency and accuracy in uncovering the corruption scandal at PT ANTAM Tbk, the corruption schemes involved, and their impact on public and investor trust. The research employs a qualitative approach using a case study analysis based on secondary data from financial reports, news articles, and legal documents. The findings reveal that financial report manipulation and ineffective supervision contributed to corrupt practices. Moreover, governance transparency failures have eroded stakeholder trust, negatively affecting business stability and investments. Therefore, reforms in corporate transparency and accuracy systems are crucial steps to prevent similar cases in the future.*

Keywords: Accuracy, Corruption, Transparency.

Abstrak. Kasus korupsi di PT ANTAM Tbk mencerminkan lemahnya transparansi dan akurasi dalam pengelolaan perusahaan serta sistem pengawasan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akurasi dalam mengungkap skandal korupsi di PT ANTAM Tbk, skema korupsi yang terjadi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan, berita, serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan dan kurangnya pengawasan yang efektif berkontribusi pada terjadinya praktik korupsi. Selain itu, kegagalan transparansi dalam tata kelola perusahaan telah merusak kepercayaan pemangku kepentingan, yang berdampak negatif terhadap stabilitas bisnis dan investasi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem transparansi dan akurasi pengelolaan perusahaan menjadi langkah krusial untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: Akurasi, Korupsi, Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari praktik korupsi sangat merusak, tidak hanya bagi perekonomian negara, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan sektor swasta. Hampir setiap hari adanya berita mengenai korupsi, yang cukup menggemparkan adalah korupsi yang dilakukan PT ANTAM sebesar 109 ton emas atau setara 185 triliun rupiah.

PT ANTAM Tbk adalah perusahaan yang beroperasi pada sektor pertambangan. Berdiri sejak tahun 1968, PT ANTAM Tbk sampai saat ini telah memperluas aktivitas perusahaan dalam bidang eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, dan pemasaran bijih feronikel, emas, perak, nikel, pasir besi, dan bauksit. Tujuan utama PT ANTAM Tbk sesungguhnya adalah terciptanya keuntungan yang sustainable sejalan dengan meningkatnya nilai perusahaan.

Keberhasilan dari praktik antikorupsi masih sangat minim sehingga sampai dengan saat ini, salah satu hal yang menyebabkan minimnya keberhasilan praktik antikorupsi ialah korupsi dilakukan secara kolektif dan sistemik (Persson et al., 2012). Akurasi dan transparansi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir lingkup terjadinya korupsi.

Akurasi memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara realistis. Data yang akurat mendukung keputusan manajemen dan pemangku kepentingan, menjadikannya aspek krusial dalam praktik akuntansi. Sedangkan Transparansi memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik dengan menyediakan informasi keuangan yang jelas. Standar akuntansi yang transparan dan akurat mendukung pengelolaan dana yang baik serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penerapan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta proses hukum menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Namun, meskipun ada berbagai peraturan dan sistem yang dibentuk untuk meningkatkan akurasi dan transparansi, tantangan besar tetap ada, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dan keterbatasan dalam implementasi di lapangan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana akurasi dan transparansi dapat membantu mengurangi praktik korupsi, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Akurasi

Akurasi adalah kedekatan hasil analisis dengan nilai sebenarnya yang menggambarkan ketepatan data dan berkaitan dengan kesalahan sistematik atau bias (Ratu Ulfiati et. al., 2017). Akurasi merupakan kemampuan alat ukur untuk melakukan pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya, sedangkan presisi menunjukkan keandalan dari hasil pengukuran yang diperoleh (Montgomery, 2009).

Transparansi

Menurut Ultrafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Tekanan eksternal terhadap transparansi, seperti Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), adalah untuk memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi dan membantu investor mengalokasikan modal ke peluang yang paling menjanjikan, sehingga menurunkan biaya modal bagi perusahaan (IASB, 2024). Mengingat bahwa efektivitas pengungkapan dalam mengurangi asimetri informasi sangat bergantung pada kualitas informasi (Brown & Hillegeist, 2007; Lambert et al., 2007), tekanan eksternal yang kuat dan pemantauan untuk transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan laporan, sehingga mendorong pihak luar untuk mempercayai informasi pribadi yang tertanam dalam laporan tersebut.

Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan oleh pejabat publik/ pemerintah ataupun swasta (salman Bahoo et. al., 2020). Korupsi publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau politisi yang melibatkan penawaran atau penerimaan

keuntungan finansial atau nonfinansial oleh orang lain di pemerintahan atau swasta. Korupsi publik diklasifikasikan sebagai korupsi kecil ketika hadiah atau bantuan kecil dipertukarkan, dan sebagai korupsi besar ketika sejumlah besar uang dipertukarkan. Korupsi publik selanjutnya diklasifikasikan sebagai korupsi terorganisasi ketika direncanakan, dan individu atau perusahaan yang terlibat harus membayar sejumlah uang sekaligus, dan sebagai korupsi tidak terorganisasi ketika tidak direncanakan, dan individu atau perusahaan yang terlibat membayar sejumlah uang yang tidak ditentukan pada setiap langkah kegiatan ilegal (Cuervo-Cazurra, 2016). Korupsi mencakup penyuapan, patronase yang tidak sah, konflik kepentingan, penyalahgunaan dana publik, dan manipulasi ekonomi (Oscar Danford, 2020).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam Penelitian Bararoh, T., & Prayitno, B. (2011) yang berjudul “Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Memengaruhi Korupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia” menguji faktor-faktor yang memengaruhi korupsi pejabat publik daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Faktor-faktor tersebut terdiri dari transparansi pemerintah, dan pendidikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah terbukti secara empiris berpengaruh terhadap korupsi pejabat publik daerah di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil tersebut sekaligus juga memberikan bukti bahwa tingkat keterjadian korupsi pejabat publik daerah tingkat kota dan kabupaten di Indonesia berhubungan erat dengan sikap transparan dari pejabat publik di daerah yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana peneliti melakukan rangkuman dan analisis terhadap data sekunder yang relevan dengan topik yang diangkat. Studi literatur adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah tersedia, yang mencakup artikel penelitian, buku, laporan, dan data perusahaan yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini, pendekatan ini diterapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan transparansi dan akurasi di PT ANTAM serta kaitannya dengan praktik korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali

wawasan yang lebih mendalam dan tidak hanya bergantung pada angka atau data numerik, tetapi juga pada makna dan interpretasi dari berbagai sumber informasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder adalah data-data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya untuk melengkapi kebutuhan data penelitian”. Menurut (Karen et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Transparansi dan Akurasi dalam Mengungkap Skandal Korupsi ANTAM

Transparansi dan akurasi merupakan dua elemen kunci dalam pencegahan dan pengungkapan korupsi, termasuk dalam kasus yang terjadi di PT ANTAM Tbk. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional perusahaan telah membuka celah bagi praktik korupsi yang sulit terdeteksi. Berdasarkan penelitian Putri Indah (2024), penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dengan memungkinkan akses cepat dan akurat terhadap data keuangan, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian laporan sejak dini. Namun, dalam kasus ANTAM, indikasi awal skandal korupsi justru muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara laporan internal dan eksternal perusahaan, yang kemudian memicu investigasi lebih lanjut. Akurasi dalam audit laporan keuangan menjadi faktor penting dalam mengungkap penyimpangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Bayu Kusuma (2024), yang menekankan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan baik mampu memastikan keakuratan data dan mengurangi risiko manipulasi laporan.

Investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan bahwa enam mantan pejabat ANTAM terlibat dalam produksi ilegal 109 ton emas yang tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Keenam tersangka tersebut adalah TK, General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) periode 2010-2011; HN, GM UBPPLM periode 2011-2013; DM, GM UBPPLM periode 2013-2017; AH, GM UBPPLM periode 2017-2019; MAA, GM UBPPLM periode 2019-2021; dan ID, GM UBPPLM periode 2021-2022. Audit eksternal semakin memperjelas adanya manipulasi data yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Idealnya, akurasi dalam pencatatan dan transparansi dalam pelaporan dapat mencegah praktik ini sejak dini. Namun, lemahnya

pengawasan internal menyebabkan penyimpangan baru terbongkar setelah kerugian negara mencapai Rp 3,3 triliun.

Keterlambatan pengungkapan skandal ini semakin menegaskan bahwa informasi yang disajikan ANTAM selama ini tidak sepenuhnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seandainya transparansi diterapkan sejak awal, ketidaksesuaian antara jumlah emas yang diproduksi dan dipasarkan seharusnya bisa langsung terlihat, sehingga mencegah praktik korupsi dalam skala besar. Sayangnya, laporan keuangan yang dipublikasikan lebih berfungsi sebagai alat legitimasi di atas kertas, sementara realitas operasional perusahaan jauh berbeda.

Kasus ini membuktikan bahwa transparansi dan akurasi bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting dalam pencegahan dan pengungkapan korupsi. Tanpa sistem pelaporan yang transparan dan pencatatan yang akurat, penyimpangan dapat terus terjadi tanpa terdeteksi. Skandal di ANTAM menegaskan bahwa tanpa reformasi dalam sistem audit dan pengawasan, kasus serupa dapat terus berulang, merugikan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap BUMN.

Skema Korupsi dan Manipulasi Laporan Keuangan di ANTAM

Skandal korupsi di PT ANTAM Tbk menunjukkan bagaimana berbagai teknik manipulasi laporan keuangan digunakan untuk menyembunyikan praktik korupsi yang telah berlangsung lama. Teknik seperti penggelapan pendapatan, pencatatan ganda, transaksi fiktif, dan akuntansi kreatif digunakan untuk menghindari deteksi auditor dan regulator. Dalam kasus ini, enam mantan pejabat Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT ANTAM didakwa karena mencantumkan cap "Logam Mulia (LM) ANTAM" secara ilegal pada emas milik pihak swasta, menyebabkan kerugian negara Rp 3,3 triliun.

Ketidaksesuaian antara laporan internal dan eksternal menjadi indikasi kuat adanya manipulasi keuangan. Laporan tahunan 2019 mencatat pendapatan bersih Rp 32,72 triliun dengan laba hanya Rp 193,85 miliar, namun pada 2020, meskipun pendapatan turun menjadi Rp 27,37 triliun, laba melonjak menjadi Rp 1,15 triliun. Lonjakan laba yang tidak wajar ini mengindikasikan adanya rekayasa laporan keuangan. Mantan auditor PricewaterhouseCoopers (PwC), Handi Sutanto, juga menyoroti ketidaksesuaian pencatatan transaksi keuangan di ANTAM yang menyulitkan proses audit dan mengaburkan transparansi.



Gambar 1. Grafik laba bersih PT ANTAM Tbk

Modus ini tidak hanya memperkaya pihak swasta yang terlibat, tetapi juga merugikan negara dalam jumlah besar. Jaksa mengungkapkan bahwa pengusaha swasta yang terlibat memperoleh keuntungan hingga Rp 3,3 triliun dari emas ilegal yang dicap dan dijual dengan merek ANTAM tanpa prosedur resmi. Kasus ini membuktikan bahwa tanpa sistem audit yang ketat dan transparansi yang lebih kuat, manipulasi laporan keuangan akan terus terjadi. Oleh karena itu, reformasi dalam pencatatan, audit, serta pengawasan BUMN menjadi keharusan agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan dan tidak lagi menjadi alat untuk menutupi praktik korupsi.

Kegagalan Transparansi dalam Tata Kelola dan Sistem Pengawasan

Kegagalan transparansi dalam tata kelola dan sistem pengawasan di PT ANTAM Tbk menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya skandal korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 3,3 triliun. Meskipun ANTAM merupakan perusahaan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kenyataannya, sistem pengawasan dan transparansi yang diterapkan masih jauh dari efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan GCG di ANTAM adalah lemahnya transparansi dalam pelaporan dan pengawasan internal. Menurut Ninditya Nareswari DKK (2023), implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) seringkali menghadapi kendala dalam pelaporan dan pengawasan yang kompleks, yang justru

membuka celah bagi praktik penyimpangan. Dalam kasus ANTAM, hal ini tercermin dari ketidaksesuaian antara laporan produksi emas dengan jumlah emas yang beredar di pasar. Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat membuat praktik manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Selain itu, kelemahan dalam sistem audit internal dan eksternal juga berkontribusi terhadap sulitnya mendeteksi praktik korupsi di ANTAM. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa terdapat kelemahan mendasar dalam perencanaan strategis, sistem audit, serta pemetaan risiko bisnis di perusahaan ini. Tidak adanya pemetaan risiko yang jelas membuat penyimpangan dalam sistem operasional dan keuangan tidak terdeteksi sejak awal. Bahkan, auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) yang meninjau laporan keuangan ANTAM juga menyoroti ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi keuangan, yang menyulitkan proses audit dan mengaburkan transparansi perusahaan.

Peran lembaga pengawas seperti BPK dan KPK menjadi krusial dalam menangani kasus ini. BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan negara dan mengungkap indikasi penyimpangan. Sementara itu, KPK sebagai lembaga anti-korupsi memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di sektor BUMN. Investigasi KPK dan Kejaksaan Agung dalam kasus ANTAM menemukan bahwa enam mantan pejabat terlibat dalam pemalsuan cap emas Logam Mulia (LM) ANTAM, yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 3,3 triliun.

Kegagalan transparansi dalam tata kelola dan sistem pengawasan di ANTAM menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem audit dan pengawasan internal harus menjadi prioritas. Penguatan peran BPK, KPK, serta peningkatan mekanisme audit independen sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi merusak sektor BUMN. Tanpa perbaikan signifikan, kasus serupa sangat mungkin terjadi di masa depan, merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan negara.

Dampak Kurangnya Transparansi terhadap Kepercayaan Publik dan Investor

Kasus korupsi di PT ANTAM Tbk tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan investor. Transparansi merupakan elemen kunci dalam menjaga kredibilitas pasar keuangan, namun kegagalan ANTAM dalam keterbukaan informasi telah memicu ketidakpastian di kalangan pemegang saham. Ketika skandal ini mencuat, kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan langsung menurun, berimbas pada harga saham dan reputasi ANTAM di pasar modal.

Hilangnya kepercayaan investor menyebabkan volatilitas harga saham dan menurunkan minat investasi. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa setelah skandal ini terungkap, saham ANTAM mengalami tekanan jual yang signifikan. Penelitian dalam jurnal *Analysis of Environmental, Social, and Governance Performance in Indonesia* juga menyoroti bahwa meskipun penerapan ESG dapat meningkatkan transparansi, banyak BUMN masih menghadapi kendala akibat standar pelaporan yang lemah dan tingginya biaya kepatuhan.

Kasus ini juga mencoreng citra ANTAM sebagai perusahaan tambang milik negara yang seharusnya menjadi contoh dalam tata kelola yang baik. Ketidaksesuaian laporan keuangan semakin memperburuk kepercayaan investor, terutama setelah laba perusahaan melonjak drastis pada 2020 meskipun pendapatan menurun. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap akurasi laporan keuangan yang dipublikasikan dan mengindikasikan kelemahan sistem audit perusahaan.

Pola ketidaktransparanan di BUMN lainnya menunjukkan bahwa kasus ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Laporan keuangan yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, dan campur tangan politik menjadi celah bagi praktik korupsi di berbagai perusahaan negara. Tanpa reformasi serius dalam tata kelola dan pengawasan, kepercayaan publik terhadap BUMN akan terus terkikis, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Reformasi Transparansi dan Akurasi untuk Mencegah Kasus Serupa

Reformasi dalam tata kelola perusahaan menjadi hal yang sangat mendesak agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membenahan sistem pelaporan dan audit untuk meningkatkan keakuratan data keuangan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi di ANTAM sulit terdeteksi adalah lemahnya mekanisme audit dan pencatatan laporan keuangan. Perusahaan BUMN seperti ANTAM harus menerapkan standar audit yang lebih ketat dengan melibatkan auditor independen yang memiliki akses penuh terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga harus diperiksa secara lebih transparan dan menyertakan catatan rinci mengenai transaksi serta pemanfaatan aset perusahaan. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah penting agar manipulasi data dapat dicegah lebih dini.

Selain membenahan audit, penguatan regulasi dan kebijakan dalam memastikan keterbukaan informasi perusahaan juga menjadi hal yang krusial. Regulasi mengenai transparansi keuangan di perusahaan BUMN perlu diperketat agar setiap transaksi dan penggunaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Kebijakan yang mengatur pelaporan keuangan harus mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat, termasuk kewajiban publikasi laporan keuangan secara berkala serta peneraan sanksi tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam manipulasi laporan. Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pelaporan yang memungkinkan whistleblower (pelapor pelanggaran) untuk mengungkap dugaan korupsi tanpa takut mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak internal perusahaan.

Menurut Wati Aris Astuti Dkk (2024) Audit teknologi informasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai koefisien positif atau berbanding lurus, hal ini menunjukkan bahwa audit teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memastikan transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan dan pengelolaan perusahaan. Implementasi blockchain dalam pencatatan transaksi keuangan dapat mengurangi risiko manipulasi data karena sistem ini mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah. Selain itu, penerapan sistem e-audit dan big data analytics dapat membantu

dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan lebih cepat. Penelitian dalam jurnal "Analysis of Environmental, Social, and Governance Performance in Indonesia" menyoroti bahwa peningkatan transparansi melalui teknologi dapat memperkuat kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya pemantauan berbasis teknologi, peluang terjadinya penggelapan dana dan manipulasi laporan dapat ditekan secara signifikan.

Tabel 1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Transparansi dan Pencegahan Manipulasi Laporan Keuangan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Teknologi Yang Dikaji	Pengaruh Terhadap Transparansi Dan Pencegahan Manipulasi
1	Andres Putranta Sitepu & Rachmad Chartady (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Kepulauan Riau	Teknologi Informasi	Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	Rafika Ludmilla & Nur Abdillah (2025)	Analisis Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Transparansi Dan Keamanan Laporan Keuangan	Teknologi Blockchain	Penerapan Teknologi Blockchain Secara Signifikan Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan di Perusahaan Yang Diteliti.
3	Sri Ayem & Rasni Amahala (2023)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)	Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi	Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, meningkatkan transparansi dan akurasi.

4	Nurul Fauziyah (2022)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada PT PLN Area Bojonegoro)	Teknologi Informasi	Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, berkontribusi pada transparansi dan pencegahan manipulasi.
5	Muhamad Rifandi (2018)	Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Teknologi Informasi	Meningkatkan nilai informasi laporan keuangan daerah, termasuk transparansi dan akurasi.

Reformasi dalam sistem transparansi dan akurasi tidak hanya penting bagi ANTAM, tetapi juga bagi perusahaan BUMN lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi. Penerapan standar audit yang lebih ketat, regulasi yang lebih kuat, dan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan dikelola dengan baik dan bebas dari praktik koruptif. Tanpa perubahan sistemik yang serius, bukan tidak mungkin kasus serupa akan kembali terjadi di masa depan, merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan milik negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi merupakan permasalahan kompleks yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperparah ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas layanan publik. Selain itu, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, yang pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas politik dan demokrasi suatu negara. Keberhasilan dari praktik antikorupsi masih sangat minim sehingga sampai dengan saat ini. Faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi antara lain adalah lemahnya sistem pengawasan, minimnya transparansi dalam birokrasi, serta kurangnya

penegakan hukum yang tegas. Jika dibiarkan, korupsi akan terus menjadi penghalang bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Untuk memberantas korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, serta masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa memandang status sosial, sehingga lebih efektif. Transparansi dan akurasi merupakan dua elemen kunci dalam pencegahan dan pengungkapan korupsi. Idealnya, akurasi dalam pencatatan dan transparansi dalam pelaporan dapat mencegah praktik korupsi sejak dini. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan sistem birokrasi yang lebih terbuka sangat diperlukan agar celah untuk melakukan korupsi dapat diminimalisir. Selain itu, akurasi memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara realistis. Data yang akurat mendukung keputusan manajemen dan pemangku kepentingan, menjadikannya aspek krusial dalam praktik akuntansi. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi serta melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai elemen bangsa, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir dan bahkan diberantas sepenuhnya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, adil, dan sejahtera bagi semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si. selaku pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi, yang telah memberikan tugas ini sebagai bagian dari pembelajaran. Tugas ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kami, tetapi juga melatih kami dalam mengembangkan keterampilan analisis, riset, dan penulisan yang lebih baik. Kami juga menghargai bimbingan dan arahan yang telah diberikan, yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga tugas ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran yang bermanfaat untuk kami di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10197>
- Antam. (2023). *Laporan keuangan konsolidasian 2019–2023*. PT ANTAM. <https://www.antam.com/id/reports/financial-reports>
- Astuti, W. A., Rahayu, S. K., & Angelina, S. A. (2024). Optimalisasi teknologi digital dan etika dalam pencegahan kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 166–177. <https://doi.org/10.34010/jra.v16i2.13878>
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 12(1), 1–12.
- Baroroh, T., & Prayitno, B. (2011). Analisis faktor transparansi pemerintah dan tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi korupsi di kabupaten dan kotamadya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen-Akuntansi*, 9(2), 160–180. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/146>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh transparansi dan hasil audit laporan keuangan terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721–2735. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Cuervo-Cazurra, A. (2016). Corruption in international business. *Journal of World Business*, 51(1), 35–49. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.015>
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud ditinjau dari etika profesi dan etika bisnis: Kasus PT Garuda Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 41–53. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>
- Dewi, M. (2017). Penggunaan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan di PT Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 44–48. <https://core.ac.uk/download/pdf/327252068.pdf>
- Fauziyah, N. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada PT PLN Area Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(13), 32–44.
- Handayani, A., & Nurulrahmatia, N. (2020). Analisis rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada PT Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(2), 18–27. <https://doi.org/10.36733/juima.v10i2.1391>
- Kusuma, B., & Akutansi, S. I. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. *Jurnal Ilmu Data*, 4(4), 1–27. <http://ilmudata.org/index.php/ilmudata/article/view/412>
- Ludmilla, R., & Abdillah, N. (2025). Analisis pengaruh teknologi blockchain terhadap transparansi dan keamanan laporan keuangan. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2), 752–760. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6958>

- Nareswari, N., Luniewska, M. T., & Al Hashfi, R. U. (2023). Analysis of environmental, social, and governance performance in Indonesia: Role of ESG on corporate performance. *Procedia Computer Science*, 225, 1748–1756. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.164>
- Nayabarani, S. D. (2017). Administrative law, other law, and workers' compensation law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1586>
- Prastika, R. Y. (2020). Efektivitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 96–112. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.134>
- Qodar, N. (2025, April 3). Kasus korupsi emas, 6 eks pejabat Antam didakwa rugikan negara Rp3,31 triliun. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com>
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014–2015 di Jawa Timur). *Integritas*, 4(1), 29–56. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1>
- Redaksi, P. M. S. (2025). 6 eks general manager UBPP LM PT Antam Tbk menjadi tersangka korupsi komoditas emas. *Kejaksaan Agung Republik Indonesia – Puspenkum*. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-ri-tetapkan-eks-general-manager-ubpp-lm-pt-antam-tbk-sebagai-tersangka-korupsi-komoditas-emas-141997-mvk.html?screen=1>
- Rifandi, M. (2018). Pengaruh teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Relasi*, 12(2), 48–58. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.263>
- Robby, K., & Angery, E. (2021). Analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan teori dasar fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1982>
- Ryandi, N. A., & Sari, R. P. (2024). The influence of accountability and transparency on public trust in villages mediated by internal control systems in Sidoarjo. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA)*, 5(3), 916–931. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i3.2722>
- Siber, P. M., & Redaksi. (2025). Terbongkar! Ini kronologi lengkap kasus emas palsu Antam 109 ton! *Kejaksaan Republik Indonesia – Puspenkum Kejagung*. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejagung-periksa-trading-and-services-manager-antam-terkait-kasus-109-ton-emas-155175-mvk.html?screen=1>
- Sitepu, A. P., & Chartady, R. (2020). Pengaruh pemanfaatan teknologi dan komitmen organisasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel intervening pada Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (CASH)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1285>
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research*

- Unit (ARU Journal), 3(1), 39–53.
<https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss1pp39-53>
- Transparansi, P., & Akurasi, D. A. N. (2024). Peningkatan transparansi dan akurasi: Transformasi audit melalui sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. *Jurnal Ilmu Data*, 4(2), 1–26. <http://ilmudata.org/index.php/ilmudata/article/view/395>
- Ulfiati, R., Tri Purnami, & Kusumadewi, R. M. (2017). Faktor yang mempengaruhi presisi dan akurasi data hasil uji dalam menentukan kompetensi laboratorium. *Jurnal Lemigas*, 51(1), 6–7. <http://www.journal.lemigas.esdm.go.id>
- Wild, J. J., & Wild, J. M. (2023). Corporate social responsibility and disclosure transparency. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2022-0309>
- Yanuar, Y. (2025, April 5). Isu korupsi PT Antam Rp 5,9 kuadriliun dan emas palsu 109 ton, ini penjelasan Kejaksaan Agung. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/isu-korupsi-pt-antam-rp-5-9-kuadriliun-dan-emas-palsu-109-ton-ini-penjelasan-kejaksaan-agung-1218554>